

PENGADILAN TINGGI BENGKULU

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni Tahun 2024

Jl. Pembangunan No. 21 Padang Harapan

Bengkulu - Bengkulu 38225

Telp. 073621585 Fax. 073621585

E-mail: pt_bengkulu@yahoo.co.id



LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN TINGGI BENGKULU

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2024

BAGIAN ANGGARAN 005.03

BADAN PERADILAN UMUM

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jl. Pembangunan No. 21 Padang Harapan

Telp. 073621585 Fax. 073621585

Bengkulu - Bengkulu 38225

E-mail : pt_bengkulu@yahoo.co.id

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Tinggi Bengkulu adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Bengkulu mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Tinggi Bengkulu. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).



Bengkulu, 29 Juli 2024
Kuasa Pengguna Anggaran,

H. NURSANI, S.H

NIP.196606101991031005

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel dan Lampiran	1
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan.....	10
I. Laporan Realisasi Anggaran	14
II. Neraca.....	16
III. Laporan Operasional.....	19
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	21
V. Catatan atas Laporan Keuangan	23
A. Penjelasan Umum.....	23
A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Tinggi Bengkulu	23
A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	24
A.3. Basis Akuntansi	24
A.4. Dasar Pengukuran	24
A.5. Kebijakan Akuntansi	25
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran.....	33
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah.....	33
B.2. Belanja	34
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	37
C.1. Aset Lancar.....	37
C.2. Aset Tetap	38
C.3. Kewajiban Jangka Pendek	42
C.4. Ekuitas.....	43
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	44
D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak	44
D.2. Beban Pegawai	44
D.3. Beban Persediaan.....	44

D.4.	Beban Barang & Jasa	45
D.5.	Beban Pemeliharaan	46
D.6.	Beban Perjalanan Dinas.....	46
D.7.	Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	47
D.8.	Beban Bantuan Sosial.....	47
D.9.	Beban Penyusutan dan Amortisasi.....	48
D.10.	Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih	49
D.11.	Beban Lain-lain.....	50
D.12.	Kegiatan Non Operasional.....	50
D.13.	Pos Luar Biasa.....	51
E.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	52
E.1.	Ekuitas Awal	52
E.2.	Surplus (defisit) LO	52
E.3.	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi / Kesalahan Mendasar	52
E.4.1.	Penyesuaian Nilai Aset	52
E.4.2.	Koreksi Nilai Persediaan.....	52
E.5.	Transaksi Antar Entitas.....	54
	Rincian Penerimaan Hibah Langsung Tahun 2024 disajikan pada lampiran	56
E.6.	Ekuitas Akhir.....	56
F.	Pengungkapan Penting Lainnya.....	57
F.1.	Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca.....	57
F.2.	Pengungkapan Lain-lain	57
	Laporan-laporan Pendukung.....	60

DAFTAR TABEL

Daftar Tabel dan Lampiran

Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2024 dan 2023.....	10
Tabel 2 Ringkasan Neraca per 30 Juni TA 2024 dan 2023	11
Tabel 3 Penggolongan Kualitas Piutang	27
Tabel 4 Tabel Masa Manfaat Aset Tetap	30
Tabel 5 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud	33
Tabel 6 Perubahan DIPA.	33
Tabel 7 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBPN per 30 Juni TA 2024	33
Tabel 8 Perbandingan Realisasi PNBPN per 30 Juni TA 2024 dan 2023.....	34
Tabel 9 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2024 dan 2023	34
Tabel 10 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2024	35
Tabel 11 Perbandingan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2024 dan TA 2023	35
Tabel 12 Perbandingan Belanja Barang per 30 Juni TA 2024 dan TA 2023	36
Tabel 13 Rincian Aset Lancar per 30 Juni TA 2024 dan 2023.....	37
Tabel 14 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran.....	37
Tabel 15 Persediaan per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023.....	38
Tabel 16 Rincian Aset Tetap.....	39
Tabel 17 Rincian Saldo Tanah.....	39
Tabel 18 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap.....	42
Tabel 19 Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni TA 2024 dan 2023	43
Tabel 20 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBPN per 30 Juni 2024 TA 2023	44
Tabel 21 Rincian Beban Persediaan per 30 Juni TA 2024 dan TA 2023	45
Tabel 22 Rincian Beban Barang dan Jasa per 30 Juni TA 2024 dan TA 2023.....	45
Tabel 23 Rincian Beban Pemeliharaan per 30 Juni TA 2024 dan TA 2023	46
Tabel 24 Rincian Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni TA 2024 dan TA 2023	46
Tabel 25 Rincian Beban Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat per 30 Juni TA 2024.....	47
Tabel 26 Rincian Beban Bantuan Sosial per 30 Juni TA 2024 dan TA 2023.....	48
Tabel 27 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 30 Juni TA 2024 dan TA 2023	49
Tabel 28 Rincian Beban Piutang Tak Tertagih per 30 Juni TA 2024 dan TA 2023	49
Tabel 29 Rincian Beban Lain-lain per 30 Juni TA 2024 dan TA 2023.....	50
Tabel 30 Rincian Kegiatan Non Operasional per 30 Juni TA 2024 dan TA 2023.....	50
Tabel 31 Rincian Pos Luar Biasa per 30 Juni TA 2024 dan TA 2023	51
Tabel 32 Rincian Koreksi Nilai Persediaan per 30 Juni TA 2024	54
Tabel 33 Rincian Koreksi Aset Tetap non Revaluasi per 30 Juni TA 2024	53
Tabel 34 Rincian Koreksi Lain-lain per 30 Juni TA 2024.....	54
Tabel 35 Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas per 30 Juni TA 2024	54
Tabel 36 Rincian Transfer Masuk.	55
Tabel 37 Rincian Pengesahan Hibah.	56

PERNYATAAN

TANGGUNGJAWAB

Pengadilan Tinggi Bengkulu

Jl. Pembangunan No. 21 Padang Harapan Bengkulu - Bengkulu 38225

Telp. 073621585 Fax. 073621585 E-mail : pt_bengkulu@yahoo.co.id

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Bengkulu yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 30 Juni Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Bengkulu telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bengkulu, 29 Juli 2024
Kuasa Pengguna Anggaran,

H. NURSANI, S.H
NIP.196606101991031005

Ringkasan

Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Bengkulu Semester I Tahun 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2024 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari 2024 s.d. Juni 2024

Realisasi Pendapatan Negara pada Semester I TA 2024 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp.700,000 atau mencapai 68 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp.1,030,000.

Realisasi Belanja Negara pada Semester I TA 2024 adalah sebesar Rp.91,066,000 atau mencapai 50 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp.181,300,000.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Semester I TA 2024 dan 2023 dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2024 dan 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2024			TA 2023
	Anggaran	Realisasi	% real. Thd anggaran	Realisasi
Pendapatan Negara	1,030,000	700,000	68	460.000
Belanja Negara	181,300,000	90.432,500	50	91.066.000

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 30 Juni 2024 dan 2023 .

Nilai Aset per 30 Juni 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp.16,801,500,- yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp. 16,801,500,-; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp.0;

Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp.0; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp.0.

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp.9,750,000,- yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp. 9,750,000 dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp.0.

Nilai Ekuitas Dana disajikan sebesar Rp.16.801.500,- yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp. 16,801,500,- dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp.0.

Ringkasan Neraca per 30 Juni 2024 dan 2023 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2 Ringkasan Neraca per 30 Juni 2024 dan 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Periode Neraca		Kenaikan/Penurunan	
	2024	2023	Rp.	%
Aset				
Aset Lancar	16.801,500	54,597,459	(37,795,959)	(69.23)
Aset Tetap	0	0	0	0,00
Aset Lainnya	0	0	0	0,00
Jumlah Aset	16,801,500	54,597,459	(37,795,959)	(69.23)
Kewajiban				
Kewajiban Jangka Pendek	9,750,000	0	9,750,000	-
Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	-
Jumlah Kewajiban	9,750,000	0	9,750,000	-
Ekuitas Dana				
Ekuitas Dana Lancar	7,051,500	54,597,459	(47,545,959)	(87.08)
Ekuitas Dana Investasi	0	0	0	0,00
Jumlah Ekuitas Dana	7,051,500	54,597,459	(47,545,959)	(87.08)
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana	16,801,500	54,597,459	(37,795,959)	(69.23)

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus(defisit) dari operasional, surplus(defisit) dari kegiatan non operasional, surplus(defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus(defisit) -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp.700,000,- sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp.104,107,096,- sehingga terdapat surplus(defisit) dari Kegiatan Operasional senilai Rp.(103,407.096,-)

Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus sebesar Rp.0 dan surplus(defisit) sebesar Rp.0 sehingga entitas mengalami surplus(defisit)-LO sebesar Rp.(103,407,096,-).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2024 adalah sebesar Rp.54,597,459,-, dikurangi surplus(defisit)-LO sebesar Rp.(103,407,096,-) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp.0 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp.55,861,137,- sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2024 adalah senilai Rp.7,051,500,-.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2024, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LRA PERBANDINGAN

I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN TINGGI BENGKULU
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024 DAN 2023
(dalam satuan Rupiah)

	Uraian	Catatan	TA 2024			TA 2023
			Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
A.	Pendapatan Negara dan Hibah	B.1				
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	1,030,000	700,000	45	460,000
	Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah		1,030,000	700,000	45	460,000
B.	Belanja Negara	B.2				
1.	Belanja Pegawai	B.2.1.	0	0	0,00	0
2.	Belanja Barang	B.2.2.	181,300,000	90,432,500	50	91.066.000
3.	Belanja Modal	B.2.3.	0	0	0,00	0
	Jumlah Belanja Negara		174,500,000	133,150,000	76	231.891.600

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

II. NERACA PERBANDINGAN

II. Neraca

PENGADILAN TINGGI BENGKULU
NERACA
PER 30 Juni 2024 dan 2023
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Juni 2024	31 Desember 2023
ASET			
Aset Lancar	C.1		
Kas dan Bank			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1. 1.	5.000.000	0
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1. 2.	600,000	0
Persediaan	C.1. 3.	11,201,500	54,597,459
Jumlah Aset Lancar		16,801,500	54,597,459
Aset Tetap	C.2		
Tanah	C.2. 1.	0	0
Peralatan dan Mesin	C.2. 2.	0	0
Gedung dan Bangunan	C.2. 3.	0	0
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.2. 4.	0	0
Aset Tetap Lainnya	C.2. 5.	0	0
Konstruksi dalam Pengerjaan	C.2. 6.	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2. 7.	0	0
Jumlah Aset Tetap		0	0
Jumlah Aset		16,801,500	54,597,459
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek	C.3		
Utang Kepada Pihak Ketiga	C.3. 1	4.750,000	0
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.3. 2.	3.004,000	0
Uang Muka dari KPPN	C.3. 3.	5.000.000	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		9,750,000	0
Jumlah Kewajiban		9,750,000	0

EKUITAS

Ekuitas Dana Lancar	C.4	7,051,500	54,597,459
Jumlah Ekuitas Dana		7,051,500	54,597,459
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana		16,801,500	54,597,459

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

III. LAPORAN OPERASIONAL

Jumlah Pendapatan		700,000	460.000
Beban			
Beban Pegawai	D. 2	0	0
Beban Persediaan	D. 3	24,188,596	18.742.119
Beban Barang dan Jasa	D. 4	12,363,500	11.114.000
Beban Pemeliharaan	D. 5	0	0
Beban Perjalanan Dinas	D. 6	67,555,000	62.855.000
Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D. 7	0	0
Beban Bantuan Sosial	D. 8	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D. 9	0	0
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D. 10	0	0
Beban Lain-lain	D. 11	0	0
Jumlah Beban		104,107,096	92.711.119
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(103,407,096)	(92.251.119)
Kegiatan Non Operasional	D. 12		
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		0	0
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0	0
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		0	0

III. Laporan Operasional

PENGADILAN TINGGI BENGKULU
LAPORAN OPERASIONAL
PER 30 Juni 2024 DAN 2023
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Juni 2024	30 Juni 2023
Kegiatan Operasional			
Pendapatan			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	700,000	460.000

Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa		(103.407.096)	(92.251.119)
Pos Luar Biasa	D. 13		
Beban Luar Biasa		0	0
Surplus (Defisit) Laporan Operasional		(103,407,096)	(92.251.119)

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN TINGGI BENGKULU
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 30 Juni 2024 DAN 2023
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Juni 2024	30 Juni 2023
Ekuitas Awal	E. 1	54,597,459	65.490.477
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	E. 2	(103,407,096)	(92.251.119)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan Mendasar	E. 3	0	0
Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	E. 4	0	0
Penyesuaian Nilai Aset	E. 4.1	0	0
Koreksi Nilai Persediaan	E. 4.2	0	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E. 4.3	0	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E. 4.4	0	0
Koreksi Lain-lain	E. 4.5	0	0
Jumlah Lain-lain		0	0
Transaksi Antar Entitas	E. 5	55,861,137	48.346.642
Ekuitas Akhir	E. 6	7,051,500	21.586.000

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Tinggi Bengkulu

Visi Pengadilan Tinggi Bengkulu adalah terwujudnya Pengadilan Tinggi Bengkulu yang Agung. Sehingga terjalin kesinambungan dengan visi Mahkamah Agung RI yang menginginkan agar Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya menjadi lembaga yang dihormati, dimana didalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya.

Misi Pengadilan Tinggi Bengkulu adalah :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Tinggi Bengkulu
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Tinggi Bengkulu
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Tinggi Bengkulu

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Tinggi Bengkulu melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

Rencana strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikan Rencana Strategis, Pengadilan Tinggi Bengkulu akan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misi untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dan memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi organisasi telah dicapai mengingat Rencana Strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi.

Rencana Strategis yang ditetapkan Pengadilan Tinggi Bengkulu adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemampuan dan kinerja Pengadilan agar lebih efektif dan efisien
2. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi peradilan
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester I Tahun 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Kantor Pengadilan Tinggi Bengkulu menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat

sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester I Tahun 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensikonvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Tinggi Bengkulu adalah sebagai berikut:

(1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2.) Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan

membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3.) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4.) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5.) Aset

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs

tengah BI pada tanggal neraca.

- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Tabel 3 Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
- Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.1.000.000 (*satu juta rupiah*);
 - Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.25.000.000 (*dua puluh lima juta rupiah*);
 - Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional

pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 4 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2016 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 5 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6.) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

- Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7.) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

Selama periode berjalan, Pengadilan Tinggi Bengkulu telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain:

Tabel 6 Perubahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan Negara dan Hibah		
Penerimaan Perpajakan	0	0
Penerimaan Negara Bukan Pajak	1,030,000	1,030,000
Hibah	0	0
Jumlah Pendapatan dan Hibah	1,030,000	1,030,000
Belanja		
Belanja Pegawai	0	0
Belanja Barang	181,300,000	181,300,000
Belanja Modal	0	0
Jumlah Belanja	181,300,000	181,300,000

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

*Realisasi
Pendapatan
Negara dan
Hibah : Rp.
700.000*

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp.700,000 atau mencapai 68 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp.1,030,000. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Tabel 7 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 30 Juni TA 2024
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	1,030,000	700.000	67,96
2.	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	0	0,00
Total Pendapatan		1,030,000	700.000	67,96

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp.700,000 atau mencapai 68 % dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp.1,030,000,-. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu adalah merupakan Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya yang berasal dari Hak Redaksi Putusan Perkara Perdata.

Perbandingan realisasi PNBPA TA 2024 dan 2023 disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 8 Perbandingan Realisasi PNBPA per 30 Juni TA 2024 dan 2023
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2024	2023	Perubahan	
				Rp.	%
1.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	700.000	460.000	240,000	52.17
2.	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	0	0	0,00
Total Pendapatan		700.000	460.000	240,000	52.17

B.2. Belanja

Realisasi
Belanja Negara :
Rp. 181,300,000,-

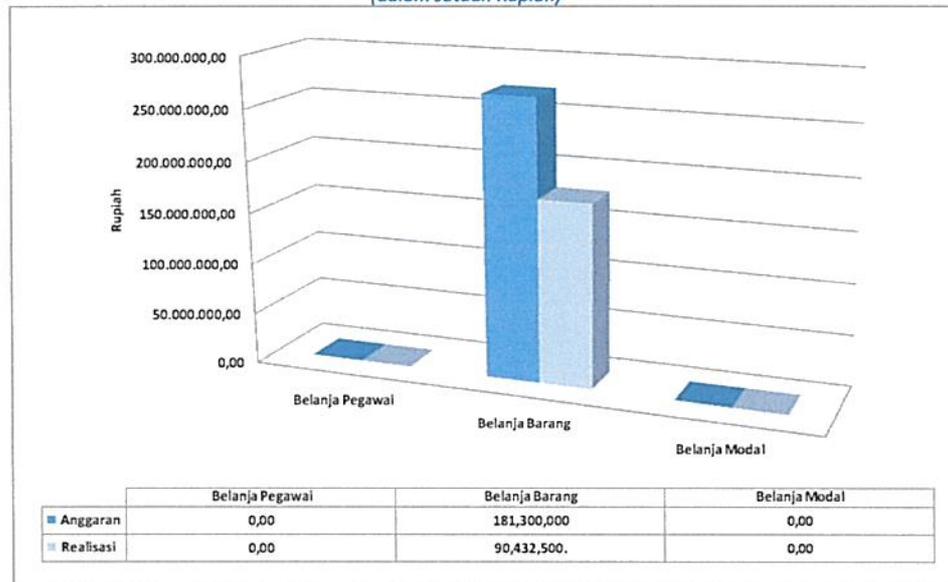
Realisasi Belanja Negara Pengadilan Tinggi Bengkulu per 30 Juni TA 2024 adalah sebesar Rp.181,300,000 setelah dikurangi pengembalian belanja, atau sebesar 50% dari anggaran senilai Rp.174,500,000. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada Semester I TA 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 9 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2024
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Per 30 Juni TA 2024		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	0	0	0,00
Belanja Barang	181,300,000	90,432,500	50
Belanja Modal	0	0	0,00
Total Belanja Bruto	181,300,000	90,432,500	50
Pengembalian Belanja		0	0
Total Belanja Netto	181,300,000	90.432.500	50

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 10 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2024
(dalam satuan Rupiah)



Sumber: Laporan Keuangan TA 2024 & 2023

Realisasi Belanja Negara mengalami penurunan sebesar Rp.(90,867,500,-) atau mencapai 50% dari realisasi tahun lalu pada periode yang sama. Penurunan tersebut disebabkan karena menurunnya pagu anggaran Belanja Barang pada Pengadilan Tinggi Bengkulu.

Perbandingan realisasi belanja TA 2024 dan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 11 Perbandingan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2024 dan TA 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2024	TA 2023	Naik (Turun)	
			Rp.	%
Belanja Pegawai	0	0	0	0,00
Belanja Barang	90.432.500	91.066.000	(633,500)	(0.69)
Belanja Modal	0	0	0	0,00
Total Belanja	90.432.500	91.066.000	(633,500)	(0.69)

B.2.1. Belanja Barang

Realisasi
Belanja Barang
:
Rp. 90,432,500

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Tinggi Bengkulu per 30 Juni TA 2024 dan TA 2023 adalah sebesar Rp.90,432,500,- dan Rp. 91.066.000.

Realisasi Belanja Barang mengalami penurunan sebesar Rp.(633,500,-) atau mencapai 0.69% dari realisasi tahun lalu pada periode yang sama. Penurunan tersebut disebabkan karena menurunnya pagu anggaran Belanja Barang pada Pengadilan Tinggi Bengkulu, dimana Tahun sebelumnya Pengadilan Tinggi Bengkulu mendapatkan pagu anggaran untuk Kegiatan Bimbingan Teknis Panitera Pengganti dan Jurusita yang terealisasi pada Semester I TA 2023.

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 12 Perbandingan Belanja Barang per 30 Juni 2024 dan TA 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2024	TA 2023	Perubahan	
	Realisasi	Realisasi	Rp.	%
Belanja Barang Operasional	7.743.500	12,174,000	(4,430,500)	(36.39)
Belanja Barang Non Operasional	4.620,000	3,380,000	1.240,000	36.69
Belanja Barang Persediaan	14,664,000	23,406,000	(8,742,000)	(37.35)
Belanja Perjalanan Dinas	63,405,000	94,190,000	(30,785.000)	(32.68)
Belanja Jasa	0	0	0	0
Total Belanja Brutto	90.432.500	133,150,000	(42,717,500)	(32.08)
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	90.432.500	133,150,000	(42,717,500)	(32.08)

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

Aset Lancar:
Rp. 16,801,500

C.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.16,801,500 dan Rp. 54,597,459. Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Pengadilan Tinggi Bengkulu per 30 Juni 2024 dan 2023 disajikan pada tabel di bawah:

Tabel 13 Rincian Aset Lancar per 30 September 2024 dan 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni TA 2024	TA 2023
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.000.000	0
Kas Lainnya dan Setara Kas	600,000	0
Persediaan	11,201,500	54.597.459
Total Aset Lancar	16.801.500	54.597.459

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di
Bendahara
Pengeluaran:
Rp. 5.000.000.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp.5.000.000,- dan Rp.0,- yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam tabel di bawah :

Tabel 14 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	30 Juni TA 2024	31 Desember TA 2023
1.	Uang Muka dari KPPN	5.000.000	0
	Jumlah	5.000.000	0

Kas di Bendahara Pengeluaran pada periode 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp.5,000,000,-.

Kas Lainnya dan

Setara Kas:Rp.600,000,-

C.1.2 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp.600,000,- dan Rp.0 adalah saldo Lainnya pada Bendahara Penerimaan yang merupakan saldo pada Rekening Pihak Ketiga untuk menampung Biaya Perkara.

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas disajikan dalam tabel di bawah :

Tabel 14 Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas

(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	30 Juni TA 2024	31 Desember TA 2023
1.	Dana Pihak Ketiga	600,000	0
	Jumlah	600,000	0

C.2.3. Persediaan

Persediaan:
Rp.11,201,500

Persediaan per 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp.11,201,500 dan Rp.54,597,459. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 15 Persediaan per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2024	31 Desember 2023
1. Barang Konsumsi	24.188.596	16,821,000
2. Bahan Untuk Pemeliharaan	0	0
3. Aset Tetap atau Persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	0	0
4. Barang dalam Proses	0	0
5. Persediaan untuk Tujuan Strategis	0	0
6. Persediaan Barang Hasil Sitaan	0	0
7. Persediaan lainnya	0	0
Total	24.188.596	16,821,000

C.2 Aset Tetap

Nilai Aset Tetap per 30 Juni 2024 dan 2023 tersaji sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap per 30 Juni TA 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 16 Rincian Aset Tetap
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	30 Juni TA 2022	TA 2021	Perubahan
1	Tanah	0	0	0
2	Peralatan dan Mesin	0	0	0
3	Gedung dan Bangunan	0	0	0
4	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
5	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0	0
	Jumlah	0	0	0
	Akumulasi Penyusutan	0	0	0
	Nilai Buku Aset Tetap	0	0	0

C.2.1. Tanah

Tanah: Rp. 0 Nilai Aset Tetap berupa Tanah per 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Rincian saldo tanah per tanggal 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 17 Rincian Saldo Tanah

No.	KIB	Luas (m ²)	No. Sertifikat	Atas Nama	Peruntukan	Jumlah
	-	-	-	-	-	-
	Jumlah					0

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin : Rp. 0 Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2023	0
Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	0
Saldo per 30 Juni 2024	0
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2024	0
Nilai Buku 30 Juni 2024	0

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan
Bangunan : Rp.
0

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2023	0
Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	0
Saldo per 30 Juni 2024	0
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2024	0
Nilai Buku 30 Juni 2024	0

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

*Aset Jalan,
Irigasi, dan
Jaringan : Rp. 0*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp. 0. Mutasi nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2023	0
Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	0
Saldo per 30 Juni 2024	0
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2024	0
Nilai Buku 30 Juni 2024	0

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap
Lainnya: Rp. 0*

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2023	0
Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	0
Saldo per 30 Juni 2024	0
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2024	0
Nilai Buku 30 Juni 2024	0

Nilai dan perhitungan penyusutan dan akumulasinya disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.6. Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam Pengerjaan : Rp. 0 Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Aset tetap : Rp. 0 Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing Rp.0 dan Rp.0.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 30 Juni 2024 disajikan pada tabel di bawah, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

Tabel 18 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	0	0	0
2	Gedung dan Bangunan	0	0	0
3	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
4	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
Jumlah		0	0	0

C.3. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek : Rp. 9,750,000. Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp.9,750,000 dan Rp.0,-. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada Pengadilan Tinggi Bengkulu per 30 Juni 2024 disajikan pada tabel di bawah :

Tabel 19 Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2024 dan 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni TA 2024	TA 2023
Utang Kepada Pihak Ketiga	4.750.000	0
Utang yang Belum Ditagihkan	0	0
Uang Muka dari KPPN	5.000.000	0
Jumlah	9.750.000	0

C.3.1. Utang Kepada Pihak Ketiga

Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp.4.750,000,- dan Rp.0,-. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan saldo Bendahara Penerimaan yang merupakan saldo pada Rekening Pihak Ketiga untuk menampung Biaya Perkara.

C.3.2. Utang yang Belum Ditagihkan

Jumlah Utang yang Belum ditagihkan per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.0,- . Utang yang Belum Ditagihkan merupakan transaksi atas pengakuan utang karena adanya BAST dari pihak ketiga (merupakan kwitansi UP yang belum di SP2D kan).

C.3.3. Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari
KPPN:
Rp. 5.000.000

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp.5.000.000. dan Rp. 0,- Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

C.4. Ekuitas

Ekuitas:
Rp.7.051.500

Ekuitas per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.7.051.500 dan Rp. 54.597.459. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

Pendapatan PNPB : Rp700.000 Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp.700.000 dan Rp. 460,000. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Tabel 20 Rincian Estimasi dan Realisasi PNPB per 30 Juni TA 2024
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	1,030,000	700.000	67.96
2.	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	0	0
Total Pendapatan		1,030,000	700.000	67.96

D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

D.3. Beban Persediaan

Beban Persediaan : Rp.24,188.596 Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.24.188.596,- dan Rp. 18.742.119,- Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 21 Rincian Beban Persediaan per 30 Juni 2024 dan TA 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2024	TA 2023	Naik(Turun)	%
Beban Persediaan Konsumsi	24.188.596	18.742.119	5.446.477	29,06
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	0	0	0	0
Beban Persediaan Suku Cadang	0	0	0	0
Beban Persediaan Lainnya	0	0	0	0
Total Beban Persediaan	24.188.596	18.742.119	5.446.477	29,06

D.4. Beban Barang & Jasa

Beban Barang &
Jasa :
Rp.12,363,500

Jumlah Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.12,363,500 dan Rp.11,114,000. Beban Barang & Jasa adalah konsumsi atas barang-barang dan jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas.

Rincian Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 22 Rincian Beban Barang & Jasa per 30 Juni 2024 dan TA 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2024	TA 2023	Naik(Turun)	%
Beban Honor Operasional Satker	0	0	0	0
Beban Bahan	4.620.000	3.380.000	1.240.000	36.69
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	7.743.500	13.278.000	(5.534.500)	(41.68)
Beban Jasa – Penanganan Pandemi Covid-19	0	0	0	0
Beban Jasa Profesi	0	0	0	0
Beban Barang Operasional Lainnya	0	0	0	0
Total Beban Jasa	12.363.500	16.658.000	(4.294.500)	(4.99)

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban
Pemeliharaan:
Rp.0

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 23 Rincian Beban Pemeliharaan per 30 Juni TA 2024 dan TA 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2024	TA 2023	Naik(Turun)	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	0	0	0	0
Total Beban Pemeliharaan	0	0	0	0

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban
Perjalanan
Dinas :
Rp. 58,955,000

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.58.955.000 dan Rp. 96,090,000. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 24 Rincian Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni TA 2024 dan TA 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2024	TA 2023	Naik(Turun)	%
Beban Perjalanan Biasa	58.955.000	76,640,000	(17.685.000)	(23.07)
Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	8,600,000	19,450,000	(10.850.000)	(55.78)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota	0	0	0	0
Total Beban Perjalanan Dinas	67.555.000	96,090,000	(28.535.000)	(29.70)

D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

*Beban Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat :
Rp.0*

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0.

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2016.

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 25 Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 30 Juni 2024 dan TA 2023 (dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2024	TA 2023	Naik(Turun)	%
Beban Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Total Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0	0

D.8. Beban Bantuan Sosial

*Beban Bantuan
Sosial : Rp.0*

Beban Bantuan Sosial Tahun Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

Rincian Beban Bantuan Sosial Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 26 Rincian Beban Bantuan Sosial
per 30 Juni TA 2024 dan TA 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2024	TA 2023	Naik(Turun)	%
Beban Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial	0	0	0	0
Beban Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial	0	0	0	0
Beban Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial	0	0	0	0
Total Beban Bantuan Sosial	0	0	0	0

D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

*Beban
Penyusutan dan
Amortisasi :
Rp.0*

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0.

Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 27 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 30 Juni TA 2024 dan TA 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2024	TA 2023	Naik(Turun)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	0	0
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0
Jumlah Penyusutan	0	0	0	0
Beban Amortisasi Aset tak Berwujud	0	0	0	0
Beban Penyusutan Aset lain-lain	0	0	0	0
Jumlah Amortisasi	0	0	0	0
Total Beban Penyusutan dan Amortisasi	0	0	0	0

D.10. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih : Rp.0

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 28 Rincian Beban Piutang tak Tertagih
per 30 Juni TA 2024 dan TA 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2024	TA 2023	Naik(Turun)	%
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek	0	0	0	0
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang	0	0	0	0
Total Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih	0	0	0	0

D.11. Beban Lain-lain

Beban Lain-Lain
: Rp.0

Jumlah Beban Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 29 Rincian Beban Lain-lain per
30 Juni TA 2024 dan TA 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik(Turun)	%
Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
Beban Aset Ekstrakomptabel Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Beban Aset Ekstrakomptabel Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0
Total Beban Lain-lain	0	0	0	0

D.12. Kegiatan Non Operasional

Beban Kegiatan
Non
Operasional :
Rp.0

Pos Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 30 Rincian Kegiatan Non Operasional
per 30 Juni TA 2024 dan TA 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2024	TA 2023	Naik(Turun)	%
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	0
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	0
Total Surplus (defisit) dari kegiatan Non Operasional	0	0	0	0

D.13. Pos Luar Biasa

*Beban Pos Luar
Biasa : Rp.0*

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 31 Rincian Pos Luar Biasa
per 30 Juni TA 2024 dan TA 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2024	TA 2023	Naik(Turun)	%
Beban Luar Biasa	0	0	0	0
Total Pos Luar Biasa	0	0	0	0

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal : Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar
Rp.54,597,459 Rp.54,597,459,- dan Rp.65,490,477.

E.2. Surplus (defisit) LO

Surplus(defisit) LO: Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 2024 dan 2023 adalah sebesar
Rp.(103,407,096) Rp.(103,407,096) dan Rp.(92,251,119). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi / Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi /Kesalahan mendasar : Rp.0. Tidak terdapat transaksi dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi/kesalahan mendasar untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024.

E.4. Koreksi Menambah dan Mengurangi

E.4.1.Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset : Rp.0. Nilai Penyesuaian Nilai Aset per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

E.4.2.Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan : Rp.0,- Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp. 0,-
Rincian Koreksi Nilai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut

Tabel 32 Rincian Koreksi Nilai Persediaan
per 30 September TA 2023
(dalam satuan Rupiah)

Jenis Persediaan	Nilai Koreksi
Barang Konsumsi	0
Suku Cadang	0
Barang Persediaan Lainnya	0
Total Koreksi Nilai Persediaan	0

E.4.3. Selisih Revaluasi Aset Tetap

*Selisih Revaluasi
Aset Tetap : Rp.0.*

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0.

E.4.4. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

*Koreksi Nilai Aset
Tetap Non
Revaluasi: Rp.0*

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai

Tabel 33 Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Tahun 2024

Jenis Aset tetap	Nilai Koreksi
Peralatan dan Mesin	0
Gedung dan Bangunan	0
Jumlah	0

E.4.5. Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain :
Rp.0.

Koreksi Lain-lain merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi antar beban, koreksi antar hibah, piutang dan utang. Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0.

Rincian Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 34 Rincian Koreksi Lain-lain
per 30 Juni TA 2024
(dalam satuan Rupiah)

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
Koreksi Beban	0
Koreksi Pendapatan	0
Koreksi Piutang	0
Koreksi Utang	0
Koreksi Hibah	0
Total Koreksi Lain-lain	0

E.5. Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar
Entitas :
Rp. 55,861,137

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.55.861.137 dan Rp.48.346.642.

Rincian Transaksi antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 35 Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas
per 30 Juni TA 2024
(dalam satuan Rupiah)

Transaksi antar entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	90.432.500
Diterima dari Entitas Lain	(700,000)
Transfer Keluar	(33.871.363)
Transfer Masuk	0
Pengesahan Hibah Langsung	0
Jumlah	55.861.137

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.5.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada K/L yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2024, DDEL sebesar Rp.(700.000), sedangkan DKEL sebesar Rp.90.432.500.

E.5.2 Transfer Masuk/TransferKeluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal K/L, antar K/L dan antara K/L dengan BA-BUN. Transfer Masuk sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 sebesar Rp.0 terdiri dari:

Tabel 36 Rincian Transfer Masuk
(dalam satuan Rupiah)

Jenis	Entitas Asal	Nilai (Rp)
-	-	-
Jumlah		-

Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 sebesar Rp.(33.871.363).

E.5.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung K/L dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 sebesar Rp.0 dari total Rp.0 yang diterima sepanjang tahun 2024.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 adalah Rp.0.

Rincian pengesahan Hibah untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 37 Rincian Pengesahan Hibah

(dalam satuan Rupiah)

Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Hibah
--	--	0
--	--	0
Total Pengesahan		0
Pengesahan Pengembalian Hibah		0
Jumlah		0

Rincian Penerimaan Hibah Langsung Tahun 2024 disajikan pada lampiran.

E.6. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir : Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.7.051.500,- dan Rp. 21.586.000,-

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Tidak ada temuan dan tindak lanjut temuan BPK yang perlu dijelaskan pada periode 30 Juni Tahun Anggaran 2024 ini.

F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual

Tidak terdapat pendapatan dan belanja akrual yang perlu dijelaskan pada periode 30 Juni Tahun Anggaran 2024 ini.

F.2.3. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Tinggi Bengkulu adalah:

1. BRI Cabang Bengkulu A/C 0115-01-001696-30-6 an. RPL 016 PT BENGKULU UNTUK PDT BIAYA PERKARA yang digunakan sebagai Penampung Biaya Perkara dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2024 sebesar Rp.600.000.

Nomor Surat Ijin (Perubahan Nama Rekening) : S-3825/MK.5/2015 tanggal 11 Mei 2015.

2. BRI Cabang Bengkulu A/C 654444005131000 an. BPG 016 PT Bengkulu yang digunakan sebagai Penampung DIPA BADILUM dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2024 sebesar Rp.0,-.

Nomor Surat Ijin (Perubahan Nama Rekening) dari KPPN : S-820/PB.3/2021 Tanggal 03 April 2021.

F.2.4. Pengungkapan Pengelolaan uang Titipan Pihak Ke-3

Informasi mengenai saldo akhir biaya perkara dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Biaya Perkara yaitu biaya yang terlebih dahulu harus dibayar oleh penggugat ketika memasukkan gugatan perkara perdata, sesuai dengan asas tidak ada biaya, tidak ada perkara. Biaya perkara pada saat putusan akhir dibebankan kepada pihak yang kalah. Sampai dengan 30 Juni 2024 jumlah biaya perkara di Pengadilan Tinggi Bengkulu sebesar Rp.600.000.
2. Biaya Konsinyasi yaitu atau yang dikenal dengan penawaran pembayaran tunai yang diikuti dengan penyimpanan dan penitipan. Sampai dengan 30 Juni 2024 jumlah biaya konsinyasi di Pengadilan Tinggi Bengkulu sebesar Rp.0.
3. Biaya Eksekusi yaitu biaya yang dikeluarkan oleh pihak yang menang dalam suatu perkara perdata terkait perkara bangunan atau tanah merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara, merupakan aturan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata. Sampai dengan 30 Juni 2024 jumlah biaya Eksekusi di Pengadilan Tinggi Bengkulu sebesar Rp.0.
4. Biaya Perkara PHI sampai dengan 30 Juni 2024 yaitu sebesar Rp.0,-.
5. Uang Titipan Perkara Pidana sampai dengan 30 Juni 2024 yaitu sebesar Rp..
6. Biaya Lain-lain sampai dengan 30 Juni 2024 yaitu sebesar Rp.0.

F.2.5. Revisi DIPA

Informasi mengenai revisi DIPA dapat dijabarkan sebagai berikut :

Revisi DIPA ke-1 Revisi Halaman III DIPA dan Pengesahan POK Tanggal 20 Februari 2024.

Revisi DIPA ke-2 Revisi Halaman III DIPA dan Pengesahan POK Tanggal 20 April 2024.

F.2.6. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Tidak terdapat mengenai Ralat SPM, SP2D, SSBP dan SSPB periode 30 Juni Tahun Anggaran 2024 pada Pengadilan Tinggi Bengkulu.

F.2.7. Catatan Penting Lainnya

Tidak terdapat Catatan Penting Lainnya Periode 30 Juni Tahun Anggaran 2024 pada Pengadilan Tinggi Bengkulu.

LAPORAN PENDUKUNG

*A. RINCIAN NILAI PEROLEHAN,
AKUMULASI PENYUSUTAN, DAN NILAI
BUKU ASET TETAP*

Pengadilan Tinggi Bengkulu

Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap

untuk Periode yang Berakhir pada 30 Juni 2024

No.	Aset Tetap	Masa Manfaat	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
A.	Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
B.	Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
C.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	0	0
D.	Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0
E.	Aset Tetap yang Tidak Digunakan	0	0	0	0
	Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		0	0	0
	Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya		0	0	0

B. INFORMASI HIBAH LANGSUNG BERUPA UANG/BARANG/JASA

PENGADILAN TINGGI BENGKULU
DAFTAR HIBAH LANGSUNG BERUPA UANG/BARANG/JASA
PER 30 Juni 2024

No.	Nama Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Sumber Dana	Nilai Hibah	Sudah Disahkan	Belum Disahkan
1.	-	0	0	0	0	0
2.	-	0	0	0	0	0
3.	-	0	0	0	0	0
4.	-	0	0	0	0	0
5.	-	0	0	0	0	0
	JUMLAH	0	0	0	0	0